

PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1983-1990

Oleh: Nenggi Bayu Cahyono, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, nenggibayu4@gmail.com

Abstrak

Bank Indonesia sebagai bank sentral milik Indonesia pada tahun 1983 dan 1988 mengeluarkan sebuah kebijakan moneter yaitu deregulasi perbankan, di dalam kebijakan tersebut terdapat kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan kebijaksanaan 27 Oktober 1988. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perbankan di Daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1946 sampai 1983, latar belakang diberlakukannya deregulasi perbankan, dan pengaruh yang ditimbulkan kebijakan deregulasi perbankan terhadap perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1983 sampai 1990. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan Setelah deregulasi perbankan diberlakukan, kurun waktu 1983 sampai 1990 perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan dari segi penghimpunan dana, penyaluran kredit, jumlah bank, jumlah kantor, dan asset. Memberikan dampak ekonomi menambah pendapatan daerah, membaiknya perekonomian rakyat dan meningkatnya ekspor nonmigas Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi terjadinya kredit macet, dan perubahan atau penyimpangan pada kredit. Secara dampak sosial meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan semakin terbentuknya pola pikir *bank minded* pada masyarakat, dampak negatif dalam bidang sosial terjadinya persaingan atau kompetisi antar bank yang semakin ketat.

Kata Kunci: *Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebijakan, Perbankan.*

INFLUENCE OF BANK INDONESIA POLICY TOWARDS BANKING GROWTH IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA 1983-1990

Abstrak

Bank Indonesia, as central bank of Indonesia, issued monetary policies concerning banking deregulation in 1983 and 1988. The policies were issued on June 1, 1983 and October 27, 1988. This study aimed to find out the banking situation in Special Region of Yogyakarta from 1946 to 1983, the rationale behind the policies, and the effects of the policies on banking growth in Special Region of Yogyakarta from 1983 to 1990. This research employed historical research method. The results showed that after the banking deregulation policy was issued, banking growth in Special Region of Yogyakarta showed improvement from 1983 to 1990. This improvement were observed in terms of funding, credit flow, number of banks, number of offices, and asset. Positive economy impacts include increase of regional income, improvement of people's financials, and increase of non-oil and gas exports in Special Region of Yogyakarta, while negative economy impacts were bad debt and credit distortion. Positive social impacts were improved living standard and bank-minded way of thinking in society, while negative social impacts were tighter competition among banks.

Keywords: *Banking, Policy, Special Region of Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral milik Negara didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau Undang-Undang No, 11 Tahun 1953. Bank Indonesia merupakan hasil Nasionalisasi dari *De Javasche Bank NV*. Tahun 1828 *De Javasche Bank* mendapat hak *octrooi* sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. *De Javasche Bank* merupakan sebuah bank swasta milik Belanda berbentuk Perseroan terbatas (*Naamlooze Vennootschap*). Sebagai bank sirkulasi *De Javasche Bank* inilah yang merintis perkembangan sistem perbankan pada zaman kolonial Hindia Belanda. Mengenai perkembangannya pada saat terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 ditunjuk lagi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral di Indonesia.¹

Upaya untuk mendukung perekonomian Belanda di Hindia Belanda, *De Javasche Bank* membuka kantor cabang hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda. Diawali dengan pembukaan kantor cabang dari *De Javasche Bank* pertama yang dilakukan di Semarang dan Surabaya pada tahun 1829, satu tahun setelah pendirian *De Javasche Bank* di Batavia. Untuk membuka kantor cabang di dua kota tersebut, *De Javasche Bank* bekerja sama dengan pengusaha setempat atas dasar perjanjian bagi hasil, sesudah pembukaan kantor cabang Surabaya.

Pada tanggal 29 Agustus 1864 dibuka cabang ketiga dari *De Javasche Bank* di Padang, dibukanya *De Javasche Bank* cabang Padang membuat pembukaan kantor cabang di daerah-daerah lain di Nusantara semakin ditingkatkan. Pada tanggal 21 Desember 1864, *De Javasche Bank* Agentschap Makassar resmi dibuka, pembukaan kantor cabang Padang dan

Makassar merupakan pembukaan kantor cabang pertama di Sumatra dan Sulawesi.²

Antara bulan Agustus hingga September 1878, Presiden *De Javasche Bank* saat itu N.P. van den Berg, melakukan perjalanan dinas ke beberapa wilayah di Jawa dan sempat mengunjungi Yogyakarta.³ Pada saat melakukan perjalanan ini muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Kantor Cabang Yogyakarta yang datang dari berbagai pihak termasuk perusahaan-perusahaan Belanda seperti Firma Dorrepaal dan Co, yang mempunyai kepentingan usaha di Yogyakarta. Gagasan tersebut disampaikan kepada Mr. N. P van den Berg (President *De Javasche Bank* ketujuh). Secara resmi *De Javasche Bank* cabang Yogyakarta dibuka pada tanggal 1 April 1879 sebagai kantor cabang kedelapan, setelah kantor cabang Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, Surakarta, dan Pasuruan.⁴

Pada masa pendudukan Jepang, *De Javasche Bank* dilikuidasi oleh Pemerintah Militer Jepang dan digantikan oleh bank milik Jepang yaitu *Nanpo Kaihatsu Ginko* sebagai Bank Sirkulasi.⁵ Masa pendudukan Jepang seluruh bank asing dilikuidasi termasuk bank-bank milik Eropa dan milik

²Supriyanto, Syefri Luwis, *Sejarah dan heritage Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hlm. 20.

³*Ibid.*, hlm. 21.

⁴Kantor Cabang Bank Indonesia Yogyakarta, *Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, (Yogyakarta: t.p, 1996), hlm. 10.

⁵Tim Penulis, *Sejarah Dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, (Jakarta: bank Indonesia, 2014), hlm. 62.

¹Tim penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 4.

Cina, sejak dilikuidasi tidak ada bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia.⁶

Setelah terjadinya likuidasi gedung *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta digunakan oleh perbankan asal Jepang yaitu *Yokohama Speciebank* sampai runtuhnya kekuasaan Jepang, dan aktifnya *De Javasche Bank* membuat gedung kembali digunakan sebagai kantor cabang *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta.

Setelah *De Javasche Bank* dinasionalisasi, tanggal 29 Mei 1953 *De Javasche Bank* menjadi Bank milik negara, disahkan oleh presiden dan dinyatakan mulai berlaku 1 Juli 1953. Bangsa Indonesia resmi memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia, sejak 1 Juli 1953, *De Javasche Bank* cabang Yogyakarta juga berubah menjadi Bank Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta. Awal perkembangannya, Bank Indonesia dihadapkan pada tugas pokok yaitu menjaga stabilitas moneter, dan mengamankan pertumbuhan ekonomi selain itu Bank Indonesia juga dihadapkan pada persoalan untuk memenuhi kebutuhan dana pemerintah, guna melaksanakan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah. Kondisi tersebut merupakan hal yang sering dihadapi oleh bank sentral di sebuah negara yang berkembang.

Pada periode 19 Agustus 1965 sampai dengan 30 Desember 1968, sesuai dengan politik perbankan dan moneter pemerintah, diberlakukan kebijaksanaan bank tunggal. Kebijakan tersebut membuat Bank Indonesia yang berkantor cabang berubah menjadi Bank Negara Unit I. Tiga bulan sebelum dimulainya Pelita I pada tanggal 31 Desember 1968, periode Bank Tunggal berakhir dan Bank Negara Unit I beserta kantor cabangnya kembali berubah menjadi Bank Indonesia dengan Undang-

Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1968.⁷ Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.13 tahun 1968 nama Bank Indonesia tidak pernah mengalami perubahan.

Bank Indonesia pada periode 1983-1988. Perkembangan perbankan di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi perbankan pada 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) yang mendorong perubahan mendasar di bidang perbankan. Kebijakan ini membuat perbankan diberi kebebasan untuk menentukan suku bunga, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.

Menindaklanjuti kebijaksanaan 1 Juni 1983, pada tanggal 27 Oktober 1988 Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan yang dikenal dengan kebijaksanaan Pakto 1988. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi bank-bank untuk menghimpun dana masyarakat yang tertuang dalam kebijakan untuk memberi kesempatan, kemudahan mendirikan bank baru,⁸ pembukaan kantor-kantor baru dan perluasan sarana pengerahan dana.⁹

Dari dua kebijaksanaan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan kebijaksanaan 27 Oktober 1988 menjadi dasar untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1983-1990.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat aturan prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber

⁶Oe Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia : Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan perbankan Indonesia (LPPI), 1991), hlm. 42.

⁷Kantor Cabang Bank Indonesia Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 14.

⁸*Ibid.*, hlm 42.

⁹*Ibid.*, hlm. 16.

sejarah.¹⁰ Di dalam metodologi sejarah terdapat empat tahapan kerja yaitu: pengumpulan data (heuristik), kritik internal, eksternal (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).¹¹ Heuristik merupakan kegiatan awal dalam tahap penelitian sejarah untuk mendapatkan data-data sejarah atau materi sejarah yang belum diolah, yang nantinya digunakan untuk sebagai sumber.¹² Sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder

sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepalanya sendiri, yaitu saksi dengan panca indera atau alat mekanis yang juga bisa menghasilkan suatu rekaman yang bisa diindera.¹³ Penelitian ini menggunakan sumber primer antara lain.

- a.) Wawancara dengan pegawai bank dan nasabah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b.) Bank Indonesia, *Statistik ekonomi keuangan daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- c.) Badan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Indikator Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Sumber sekunder adalah kesaksian seseorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni seseorang yang

¹⁰Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 112.

¹¹Rahmad Hamid, Muhamad Saleh, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 43.

¹²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 86.

¹³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, *Understanding History: A Primer Of Historical Method*, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 32.

tidak hadir pada waktu terjadinya peristiwa.¹⁴ Tahap selanjutnya dalam penulisan sejarah setelah melakukan heuristik yaitu adalah kritik sumber atau verifikasi. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan agar terhindar dari fantasi dan manipulasi. Verifikasi ada dua macam: autensitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik internal.¹⁵

Penafsiran (Interpretasi) adalah menafsirkan sumber-sumber atau data-data sejarah yang telah dikumpulkan dan yang sudah diverifikasi. Menurut Kuntowijoyo dalam interpretasi memiliki dua macam cara untuk mendapatkan fakta sejarah yaitu analisis dan sintesis, adapun analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan.¹⁶ Setelah tahap interpretasi selesai selanjutnya tahap akhir dari metode penelitian yaitu historiografi (penulisan sejarah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta 1946-1983

Secara geologis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusatnya kota Yogyakarta. Secara astronomis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak kurang lebih antara 110° 23' 79'' - 110° 28' 53'' Bujur Timur dan terletak lebih kurang 7° 49' 26'' - 7° 50' 84'' Lintang Selatan. Kota Yogyakarta dilalui oleh garis paralel 8° 18' 4, 93'' Lintang

¹⁴Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 96.

¹⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 78.

Selatan dan garis meridian 110° 51` 50 87`` Bujur Timur.¹⁷

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam segi wilayah meliputi bekas Swapraja Kasultanan Yogyakarta dan bekas Swapraja Pakualaman serta bekas daerah *enclave*¹⁸ Kapanewon Ngawen di Gunung Kidul, bekas *enclave* Kawedanan Imogiri dan Kapanewon Kotagede di Bantul. Mengenai Ketiga daerah tersebut semula termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas keseluruhan 3.185,80 km².

Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai praktek perbankan sudah ada sejak zaman Belanda yaitu dengan berdirinya cabang dari *De Javasche Bank* yaitu *De Javasche Bank Agentchap* Yogyakarta pada 1879.¹⁹ Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perbankan juga sudah berdiri Bank Desa atau Lumbung Desa yang kebanyakan beroperasi khususnya pada daerah pedesaan yang hampir tersebar di beberapa wilayah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat Indonesia diduki oleh tentara militer Jepang, hal tersebut membawa dampak salah satunya menimbulkan perubahan dalam bidang ekonomi, salah satunya pemerintah Militer Jepang melakukan likuidasi terhadap perbankan milik Belanda, Inggris, Cina,

dan bank-bank lokal.²⁰ Hal tersebut membuat khususnya kondisi perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami dampak salah satunya dilikuidasinya *De Javasche Bank Agentchap* Yogyakarta dan di gantikan oleh bank asal Jepang yaitu *Yokohama Speciebank*.

Setelah runtuhnya kekuasaan Jepang, Kedatangan Belanda di Indonesia kembali dengan atas nama NICA, Belanda berupaya untuk merebut kembali kekuasaannya di Indonesia dalam hal ini Belanda melancarkan dua kali agresi militer yang pertama terjadi pada 21 Juli 1947 sedangkan agresi yang kedua terjadi pada 19 Desember 1948. Agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda membuat Keadaan sosial ekonomi pada masa revolusi fisik di Indonesia sangatlah buruk, hal tersebut membuat pengaturan ekonomi pada masa revolusi fisik bersifat “ekonomi darurat perang”. Situasi revolusi fisik khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat akibat dari ekonomi darurat perang yang lebih berat, karena kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara.²¹

Pada 19 Desember 1948, saat agresi militer yang kedua Kota Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda dengan dikuasainya kota Yogyakarta, *De Javasche Bank Agentchap* Yogyakarta dibuka kembali oleh Belanda dalam hal ini sesudah kantor cabang *De Javasche Bank Agentchap* Yogyakarta ditutup oleh Jepang gedung bekas bank dari *De Javasche Bank Agentchap* Yogyakarta dipakai oleh bank dari Jepang yaitu *Yokohama Speciebank*, setelah Jepang meninggalkan Indonesia gedung tersebut dipakai oleh Bank Negara

¹⁷Ryadi Goenawan, Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yoyogyakarta Periode Awal Abad Dua Puluhan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993), hlm. 14.

¹⁸Enclave adalah suatu wilayah suatu negara atau suatu kerajaan yang letaknya justru berada di wilayah negara lain atau kerajaan lain atau dikelilingi oleh kerajaan lainnya lagi daerah enclave dapat timbul karena berbagai sejarah, politis, atau geografis.

¹⁹Supriyanto, Syefri Luwis, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁰R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85.

²¹Tim Penulis, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976/1977-), hlm. 343.

Indonesia (BNI) sebagai kantor pusat, serta untuk melakukan kegiatan perbankan. Pada saat Belanda mulai menguasai kota Yogyakarta dan membuka kembali *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta, gedung yang dipakai Bank Negara Indonesia (BNI) kembali digunakan oleh *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta serta membuat kegiatan Bank Negara Indonesia (BNI) terganggu dan akhirnya terpaksa ditutup. Pembukaan kantor cabang *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta tidak berlangsung lama, dikarenakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam diplomasinya memerintahkan Belanda untuk keluar dari Yogyakarta dan mengembalikan Yogyakarta ke tangan Indonesia sebagai Ibukota Republik Indonesia.

Pada 10 April 1953 parlemen memberikan persetujuan, dan pada tanggal 19 Mei 1953, rencana untuk membuat undang-undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) yang merupakan undang-undang bagi Bank Sentral disahkan oleh Presiden dan diumumkan pada 2 Juni 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953).²² Setelah disahkan undang-undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953. Secara resmi *De Javasche Bank* digantikan kedudukannya sebagai bank sentral oleh Bank Indonesia pada 1 Juli 1953.²³

Pada masa orde lama Pada tanggal 4 dan 21 Juni 1965, Presiden Sukarno mengeluarkan beberapa Penetapan Presiden yang mengatur pengintegrasian bank-bank umum milik pemerintah ke dalam Bank Indonesia. Bank Koperasi, Tani dan Nelayan terintegrasi pada tanggal 4 Juni 1965. Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia mengalami integrasi pada 21 Juni 1965. Proses selanjutnya mengenai empat bank yang telah diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dan Bank Indonesia sendiri dilebur ke dalam Bank Tunggal

yang diberi nama Bank Negara Indonesia (BNI). Perubahan tersebut membawa dampak kepada cabang dari Bank Indonesia khususnya kantor cabang Bank Indonesia Yogyakarta yang berubah menjadi Bank Negara Indonesia I kantor cabang Yogyakarta. Kantor cabang membawahi wilayah Yogyakarta dan Karisidenan Kedu.²⁴

Pada 31 Desember 1967, dan pada 31 Desember 1968 periode Bank Tunggal berakhir dan Bank Negara Unit I beserta kantor cabangnya kembali menjadi Bank Indonesia berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1968. Pada awal 1980, terjadinya resesi ekonomi dunia dan semakin memburuk pasaran minyak internasional telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia khususnya terhadap neraca pembayaran.²⁵ Hal ini mengakibatkan kelemahan-kelemahan struktural yang ada pada perekonomian Indonesia seperti ekonomi biaya tinggi, *inefisiensi*, dan distorsi pasar yang menjadi semakin terasa dan memberatkan.²⁶

Terjadinya penurunan harga minyak bumi akhir tahun 1981 yang melanda Republik Indonesia berakibat telah mengurangi kemampuan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan serta telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini pemerintah segera mengambil

²⁴ J. Soedrajat Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode II : 1959-1966*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 144.

²⁵ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia, Seberapa jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 156.

²² *Ibid.*, hlm. 32.

²³ Oe Beng To, *op.cit.*, hlm. 250.

²⁶ *Ibid.*

langkah mendasar secara terpadu di berbagai bidang yaitu dengan dilaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Salah satu kebijakan mendasar yang ditempuh adalah di bidang moneter yaitu deregulasi perbankan 1 Juni 1983.

Kebijakan pemerintah di bidang moneter yang melakukan deregulasi dengan menetapkan kebijaksanaan 1 Juni 1983 (Pakjun) merupakan sebuah perkembangan baru di bidang perbankan, saat Indonesia mengalami kesukaran di era pasca minyak.²⁷ Pada deregulasi perbankan 1 Juni 1983 mempunyai maksud Penghapusan pagu kredit perbankan, Pemberian kebebasan bank-bank pemerintah untuk menetapkan sendiri kebijakan perkreditan termasuk suku bunga dan suku bunga deposito, dan penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia hanya untuk sektor yang berprioritas tinggi.

Diberlakukan kebijakan 1 Juni 1983 untuk mendorong perbankan lebih meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan kemandirian serta perbankan dianggap dewasa untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Memasuki bulan Oktober 1988 pemerintah mengumumkan sebuah serangkaian peraturan baru yang lebih komprehensif dan ditujukan untuk membuat sistem finansial lebih kompetitif dan meninggikan efektivitas Bank Indonesia. Hal tersebut diharapkan sistem finansial dapat menyumbangkan pencapaian tujuan ekonomi yang lebih luas, dan selanjutnya mengenai perekonomian dan perluasan yang lebih di bidang ekspor nonmigas.²⁸ Pada tanggal 27

Oktober 1988 telah ditetapkan kebijaksanaan moneter baru di bidang keuangan, moneter, dan perbankan yang diberlakukan dalam rangka mendorong, mempertahankan, dan memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.²⁹

Bank Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta menerbitkan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau Pakto 27/1988 disebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 merupakan sebuah titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971-1972, yang pemberian izin usaha bank baru dihentikan sejak tahun 1971, dan dibuka kembali dalam kebijakan Pakto 1988. Rangkaian kebijaksanaan Pakto 1988 yang paling penting adalah kemudahan mendirikan bank swasta dengan syarat permodalan yang sangat rendah yaitu 10 miliar.

Ketentuan ini menghilangkan *barrier to entry* bank-bank swasta, termasuk juga kemudahan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di tingkat kecamatan dengan syarat modal hanya Rp 50 juta. Di dalam kebijakan tersebut juga ada keinginan untuk lebih mempercepat penarikan dana masyarakat bahwa semua pelaku perbankan termasuk BUMN dan bank perkreditan rakyat (BPR) mendapatkan fasilitas yang diantaranya dimanfaatkan oleh pelaku perbankan yaitu dengan mendirikan bank sampai ke tingkat desa.³⁰

Ketika Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau yang dikenal dengan Pakto 1988 diharapkan untuk lebih meningkatkan pengerahan

²⁷Sawidi Widoatmodjo, *Ekonomi Indonesia Pasca Boom Minyak: Analisis Kebijaksanaan Ekonomi Tanpa Dominasi Migas*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVIVERSITY PRESS, 1992), hlm. 103.

²⁸Anne Booth, *Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya : Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia dalam Era*

Orde Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1994), hlm. 145.

²⁹Aulia Pohan, *op.cit*, hlm. 123.

³⁰ Arif Khayat, "Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat Di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990", *Humaniora*, (Vol 27, No.2), hlm. 261.

dana masyarakat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan perluasan dana dan penyaluran dana masyarakat secara lebih intensif dan efisien. Penyempurnaan, dan perluasan dalam rangka pengerahan dana dan penyaluran dana dilakukan dengan memberikan kemudahan mendirikan bank baru dan kantor cabang baru.³¹

Perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta ketika sebelum di berlakukannya deregulasi perbankan dari segi jumlah bank belum begitu banyak dan dari masing - masing perusahaan bank belum banyak membuka cabang, kas pembantu dan kas keliling. Mengenai kegiatan perbankannya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum deregulasi perbankan diberlakukan, bank dianggap seperti raja jadi para nasabah seperti memintameminta kepada bank agar diberikan kredit yang dibutuhkan.³²

Banyak penduduk di pedesaan yang mempunyai pandangan apabila orang yang punya hutang hidup tidak akan tenang, terlebih lagi mempunyai hutang kepada pemerintah. Semisal apabila dalam jangka waktu sekian bulan tidak dapat melunasi hutang, barang jaminan akan menjadi tanggungan. Hal tersebut membuat tidak sedikit penduduk merasa tidak mampu menyediakan jaminan seperti berupa rumah atau tanah sebagai jaminan dengan pedoman apabila tidak dapat melunasi hutang. Kredit melalui badan milik pemerintah sekalipun mempunyai bunga rendah, masih banyak penduduk seperti keberatan untuk berurusan dengan badan-badan kredit tersebut. Hal ini disebabkan sikap mental khususnya petani yang hanya berorientasi pada masa kini saja.³³ Secara

umum yang berurusan dengan bank kebanyakan hanya kaum pedagang, dikarenakan uang yang dipinjam dari bank dipergunakan untuk modal berarti uang tersebut akan bergerak.

Hal tersebut membuat kebanyakan dari masyarakat berpandangan mengenai bank yaitu apabila kredit melalui bank sulit didapatkan, dikarenakan prosedurnya yang berbelit-belit dan tidak dapat selesai dengan satu hari saja. Membuat kebanyakan masyarakat berpandangan lebih menyita waktu. Terlebih lagi apabila sudah mendapat kredit, masyarakat masih tidak puas karena tidak mendapatkan kredit yang dibutuhkan.³⁴

Terkadang juga jarak antara rumah dan tempat bank berada cukup jauh yang disebut biaya transaksi selain bunga yang harus dibayar semua biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kredit. Selain itu belum meratanya keberadaan bank termasuk menjadi hambatan masyarakat khususnya yang ada di pedesaan untuk berurusan dengan bank. Hal tersebut menyebabkan petani lebih suka pinjam kepada orang-orang satu desa, dan tidak sedikit yang meminjam kepada pelepas uang, pelepas uang adalah usaha perseorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai, seperti rentenir. Kehadiran rentenir dan tingkat bunga yang relatif tinggi di pedesaan merupakan pertanda masih belum terpenuhinya kebutuhan kredit yang amat besar dari masyarakat pedesaan.

Praktek rentenir di Daerah Istimewa Yogyakarta kebanyakan terjadi di wilayah pedesaan dan di pasar. Pada tahun 1980-an di Gunung Kidul praktek rentenir kebanyakan terjadi di wilayah pasar. Dari segi prakteknya Kebanyakan rentenir ini

³¹*Ibid.*

³²Tri Setyo Margiyanto, Wawancara di kantor Bank Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Februari 2018.

³³Ninik Kasniah, *Ijon Di Desa Sukomangu Kabupaten Wonogiri*, dalam Laporan Penelitian I Ijon Di Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, (Lembaga Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada: t.p, 1973), hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

memudahkan para peminjam dengan mengantarkan langsung uang ke tempat usahanya. Di lain sisi dari segi pembayaran tagihan kreditnya para rentenir ini juga langsung mendatangi para peminjam tidak perlu setor.

Pada akhir tahun 1987, Di Kabupaten Sleman khususnya di wilayah pedesaan terjadi praktek rentenir. Hal ini mengenai rentenir, kebanyakan para rentenir dari segi prakteknya, para rentenir secara langsung menawarkan kredit dengan cara keliling di warung-warung yang berada di pedesaan dan menawarkan kredit di sekitar pasar kepada para pedagang atau *bakul*. Praktek rentenir yang berada di pedesaan, seorang yang menjadi rentenir biasanya orang satu desa atau tetangga desa.³⁵

Dari segi suasana, pihak bank begitu merasa dibutuhkan dan masyarakat sangat membutuhkan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah deregulasi perbankan yang dimulai dari paket kebijaksanaan 1 Juni 1983, di kota Yogyakarta yang berpenduduk sekitar 400.000 jiwa sebelum diberlakukan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 sudah terdapat sekitar 30 cabang bank-bank milik negara dan swasta serta sub-sub cabang di berbagai bagian kota termasuk kantor-kantor kas BRI di berbagai lokasi, dan rencana pendirian BPR (bank perkreditan rakyat).³⁶

Walaupun mengenai keberadaan kredit pedesaan sudah ada sejak awal abad ke-20, tetapi dalam prakteknya mengenai kredit pedesaan masih merupakan hal baru khususnya bagi petani. Masyarakat pedesaan yang memiliki latarbelakang sosial-budaya yang berbeda, kebanyakan masih belum mengenal apa sesungguhnya

bank itu dan mungkin pula belum pernah melihat bank secara fisik dan masih ada masyarakat yang mengenal makna kata kredit walaupun tidak sepenuhnya.³⁷

Tabel 1.
Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1986 Sampai 1990

Jenis bank	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
Jumlah Bank	11	13	13	17
Jumlah kantor	40	42	124	155

Sumber : Bank Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta, *Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta*, 1992, hlm.1.

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa setelah deregulasi perbankan diberlakukan perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan dari segi jumlah bank, dan pertumbuhan yang paling signifikan adalah dari segi kantor cabang.

Perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi asset, dana, dan kredit. Dari akhir bulan Desember 1988 dari segi asset mencapai 535 miliar, akhir Desember 1989 mencapai 768 miliar, dan akhir Desember 1990 sudah mencapai 1.007 miliar. Sedangkan dari segi dana pada akhir Desember 1988 mencapai 268 miliar, akhir Desember 1989 mencapai 418 miliar, dan akhir Desember 1990 mencapai 634 miliar. Untuk kredit akhir Desember 1988 tercatat 382 miliar,

³⁵Lestari Pudwi Astuti, Wawancara di Perpustakaan Pedesaan Dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 20 Maret 2018.

³⁶Mubyarto, *Kredit Pedesaan Di Pedesaan*,(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1986), hlm. 9.

³⁷Edy Suandy Hamid, dkk., *Dua Model Program Kredit Di Jawa Tengah: Suatu Studi Kasus*, dalam Seminar Hasil Observasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1986), hlm. 2.

akhir Desember 1989 terbilang 489 miliar, dan akhir Desember 1990 mencapai 676 miliar³⁸

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak diberlakukannya kebijakan deregulasi perbankan memperlihatkan pertumbuhan perbankan yang cukup signifikan. Dampak dari pertumbuhan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya terasa di sektor ekonomi khususnya untuk perekonomian daerah dan perekonomian rakyat.

Hal ini khususnya mengenai perekonomian daerah, setelah kebijakan deregulasi perbankan diberlakukan, dan menimbulkan dampak *banking booming* di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini diikuti pula kenaikan mengenai APBD yang meningkat. gejala tersebut terjadi akibat dari pemerintah daerah yang mencari pendapatan asli daerah antara lain dari perbankan. Hal ini semakin meningkatnya APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan perbankan ikut andil menyumbang dalam hal pendapatan daerah. Khususnya untuk perbankan milik pemerintah yaitu bank perusahaan daerah (PD). Keberhasilan perbankan dalam hal meningkatkan pendapat daerah.

Menurut Kakanwil Departemen Perindustrian Drs. Soekarno pada forum komunikasi dunia usaha di Gedung Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, ekspor hasil industri dalam periode Pelita IV menunjukkan perkembangan yang semakin membahagiakan sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap ekspor nonmigas maupun total ekspor nasional. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta nilai ekspor tahun 1983 sebesar 4.206.182,53 dolar AS dan tahun 1987 mencapai 15.064.066,67 dolar AS sedang tahun 1988

periode Januari sampai Agustus mencapai sebesar 16.063.796,18 dolar AS.³⁹

Dampak yang ditimbulkan dengan semakin banyaknya industri perbankan yang mencakup bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini masyarakat dimudahkan untuk memperoleh dana yang dapat diperoleh dari bank untuk memenuhi kebutuhan atau untuk usaha. Salah satu contoh Bank Pasar Yogyakarta yang membiayai atau memberikan modal kepada para pedagang pakaian yang berada di pasar Brinjarjo sehingga membuat para pedagang pakaian mengalami peningkatan dalam hal produksi dan dari segi usaha yang sebelumnya masih lokal menjadi nasional. Secara otomatis akan mempengaruhi dalam hal penyerapan tenaga kerja.⁴⁰

Di lain sisi terdapat dampak negatif secara ekonomi yaitu dengan semakin banyaknya bank yang berdiri dan khususnya bertambah cabang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Terjadinya kredit macet dikarenakan persaingan dan kompetisi antar bank yang semakin ketat. Semakin ketat persaingan antar bank membuat para bank untuk mendapatkan modalnya lebih mahal, dikarenakan semua bank menginginkan modal untuk membiayai perbankannya. Semakin banyak bank membuat kebanyakan para bank dari segi cara penilaian kualitas nasabah terabaikan.

Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kredit macet. Setelah deregulasi perbankan diberlakukan membuat hampir seluruh bank mengalami kredit macet,

³⁸Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Kantor Cabang Bank Indonesia Yogyakarta, Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia, hlm. 1.

³⁹Kakanwil Departemen Perindustrian, *Hingga Pelita IV Pembangunan Industri Tumbuh Makin Mantab*, Kedaulatan Rakyat, 3 Januari 1989.

⁴⁰Sutryana, Wawancara di Rumah Bapak Sutryana, 10 September 2018.

salah satunya yang terjadi pada Bank Harapan Sentosa dan Bank Duta. Selain terjadi kredit macet, terjadi penyimpangan dan perubahan sasaran penggunaan kredit, dari kredit produktif menjadi kredit komsumtif. Contoh kredit konsumtif yaitu untuk membiayai pernikahan, membeli mobil, dan motor.

Pengaruh adanya pertumbuhan perbankan dalam perkembangan ekonomi, kemudian secara otomatis juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat khususnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin banyaknya bank yang berdiri dan semakin aktifnya pihak bank mensosialisasikan kepada masyarakat secara otomatis membuat masyarakat semakin mengerti keberadaan perbankan ini sehingga masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang berada di perbankan (*bank minded*) tersebut.

Semakin berminatnya masyarakat pada keberadaan banyaknya bank yang berdiri. Keadaan tersebut menimbulkan terbentuknya pola pikir baru dan perubahan pada gaya hidup pada masyarakat yaitu masyarakat mulai berfikir apabila dananya disimpan di bank akan lebih aman daripada dirumah. Hal lain dengan semakin banyaknya bank-bank yang berdiri perubahan gaya hidup lain dari masyarakat khususnya mengenai kredit, masyarakat akan memanfaatkan banyaknya bank-bank tersebut yaitu dengan meminjam dana lebih dari satu bank.⁴¹

Semakin banyak bank yang berdiri membuat persaingan antar bank semakin ketat dan menimbulkan dampak negatif yaitu bank gulung tikar (bangkrut) atau bahkan bergabung (*merger*). Bank yang gulung tikar disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing dalam dunia perbankan maupun kesalahan yang diakibatkan pengelolaan pada bank sendiri. Salah satunya yang terjadi pada Bank Harapan Sentosa dan Bank Duta. Bank

Duta berdiri pada tahun 1966, yang didirikan oleh Suhardiman, Thomas Suyatno, dan Njo Jan Siang. Kedua bank tersebut mengalami kebangkrutan yang disebabkan pada kredit macet dan ketidakmampuan pengelolaan bank serta terjadinya korupsi.

Di lain sisi apabila sebuah bank mengalami gulung tikar (bangkrut) atau *merger*, hal ini yang paling dirugikan adalah masyarakat atau nasabah dikarenakan modal atau simpanan akan terhambat dari segi pengembalian atau yang dikhawatirkan modal atau simpanan tidak akan dikembalikan. Terlebih lagi apabila bank yang mengalami kebangkrutan mempunyai cabang yang begitu banyak⁴²

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada sejak zaman Belanda yaitu diawali dengan berdirinya cabang dari *De Javasche Bank* yang diberi nama *De Javasche Bank Agentschap* Yogyakarta. Terjadinya penurunan pada harga minyak pada masa awal orde baru berakibat telah mengurangi kemampuan negara untuk membiayai kegiatan khususnya dalam pembangunan sehingga keadaan ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Keadaan tersebut membuat pemerintah beralih tidak hanya bertumpu pada hasil minyak tetapi akan melakukan terobosan baru yaitu akan mengandalkan penerimaan di sektor swasta diluar minyak dan gas.

Hal ini pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan deregulasi. Salah satu kebijakan mendasar yang dilakukan adalah di bidang moneter yaitu dengan diberlakukannya kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983, dan dilanjutkan kebijaksanaan 27 Oktober 1988. Diberlakukannya kebijakan deregulasi tersebut diharapkan sektor swasta akan

⁴¹Sukardi, Wawancara di Rumah Bapak Sukardi, 14 April 2018.

⁴²Broto, Wawancara di Rumah Bapak Broto, 10 September 2018.

ditingkatkan dalam segi perannya untuk meningkatkan ekspor nonmigas demi menunjang pertumbuhan ekonomi.

Secara inti kebijaksanaan 1 Juni 1983 adalah kebijakan yang memudahkan dalam hal penyaluran kredit. Semenjak diberlakukannya kebijaksanaan 1 Juni 1983, Secara garis besar pokoknya perbankan dituntut untuk lebih meningkatkan dalam memobilisasi dana serta mempertinggi tingkat *efisiensi* dan profesionalisme perbankan. Untuk mendorong peran lebih besar dari sektor swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai ekspor nonmigas mengalami perkembangan yang meningkat. Sejak diberlakukannya kebijaksanaan 1 Juni 1983 keadaan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar dalam hal kegiatan usaha perbankan. Perkembangan perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam penghimpunan dana dan dalam menyalurkan kredit sehingga dapat mendorong pembangunan daerah dan perekonomian rakyat.

Dikeluarkannya kebijaksanaan 27 Oktober 1988 memiliki tujuan untuk semakin lebih meningkatkan penerahan dana masyarakat yaitu dengan memberikan kemudahan membuka bank baru dan kantor cabang. Di Daerah Istimewa Yogyakarta perkembangan perbankan mengalami pertumbuhan dari segi jumlah bank, kantor bank, dan asset atau usaha dibandingkan sebelum deregulasi perbankan diberlakukan. Hal ini dikarenakan banyak sektor swasta yang menjadikan kebijakan 27 Oktober sebagai momentum untuk mendirikan sebuah bank baru maupun mendirikan sebuah kantor cabang baru yang secara langsung menimbulkan terjadinya *banking booming* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semakin bertumbuhnya industri perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Secara ekonomi dengan semakin bertumbuhnya perbankan membuat pendapatan daerah semakin mengalami kenaikan, salah satunya yang disumbangkan di berbagai sektor swasta dalam bentuk pajak. Pada perekonomian rakyat, semakin bertumbuhnya perbankan membuat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dikarenakan masyarakat lebih mudah memperoleh dana atau modal hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk usaha. Secara sosial bertumbuhnya industri perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan aktifnya pihak bank untuk mensosialisasikan banknya membuat masyarakat menjadi semakin mengerti apa itu bank dan mengerti akan fasilitas yang ada di bank dan dapat memanfaatkannya (*bank minded*), hal ini melahirkan sebuah pola pikir baru dan gaya hidup baru pada masyarakat. Di lain sisi bertumbuhnya perbankan juga menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kredit macet, perubahan atau penyimpangan pada kredit, dan persaingan dan perlombaan antar bank yang semakin ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Surat Kabar, dan Wawancara

Badan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Indikator Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Bank Indonesia, *Statistik ekonomi keuangan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Kakanwil Departemen Perindustrian, *"Hingga Pelita IV Pembangunan Industri Tumbuh Makin Mantab"*, Kedaulatan Rakyat, 3 Januari 1989.

Wawancara dengan pegawai bank dan nasabah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku

- Anne Booth, *Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya : Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia dalam Era Orde Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1994.
- Bank Indonesia, *Sejarah bank Indonesia Periode III : 1966-1983 bank Indonesia Masa Stabilitas, Rehabilitas, dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: bank Indonesia, 2006.
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Edy Suandy Hamid, dkk., *Dua Model Program Kredit Di Jawa Tengah: Suatu Studi Kasus*, dalam Seminar Hasil Observasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1986),
- Faried Wijaya M., Soetatwo Hadiwigeno, *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Yogyakarta: BPFE, 1980.
- H.w.Arnadt, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 1991.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- J. Soedradjad Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode IV : 1983-1997 Bank Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia: 2006.
- Kantor Cabang Bank Indonesia Yogyakarta, *Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta*, Yogyakarta: t.p, 1996.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Understanding History: A Primer Of Historical Method, Jakarta: UI Press, 1975.
- Mohtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1977-1997*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mubyarto, *Deregulasi Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: P3KP Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, 1991.
- Ninik Kasniah, *Ijon Di Desa Sukomangu Kabupaten Wonogiri*, dalam Laporan Penelitian I Ijon Di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, (Lembaga Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada: t.p, 1973), hlm. 13.
- Oe Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia : Jilid I (1945-1958)*, Jakarta: Lembaga Pengembangan perbankan Indonesia LPPI, 1991.
- R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Rahmad Hamid, Muhamad Saleh, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*

- Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Sawidi Widoatmodjo, *Ekonomi Indonesia Pasca Boom Minyak: Analisis Kebijakan Ekonomi Tanpa Dominasi Migas*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVIVERSITY PRESS, 1992.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Suhartono W. Pranoto, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tim LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
- Tim penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Tim Penulis, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976/1977.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.
- Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Arif Khayat, "Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat Di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990", *Humaniora*, Vol 27, No.2.
- Arifin Siregar, *Peningkatan Efisiensi dan Pelayanan : Masih Perlu*, dalam *Jurnal Prisma*, No.6, 1986 Tahun XV.
- Marzuki Usman, *Tiga Tahun Deregulasi : Sebuah Tinjauan Mikro Perbankan*, dalam *Jurnal Prisma*, No.6, 1986 Tahun XV.
- Mubyarto, *Pakto 27: Rakyat Kecil Risaukan Agresivitas Bank-Bank Modern di Sekitar Mereka*, dalam majalah *Basis* edisi 2 Februari 1990 XXXIX.
- Redaksi, *Bank Bersaing Total*, dalam *Jurnal Prisma*, No 7, Juli 1983 tahun XII.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Adhi Ardiyanto, *Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Moneter dalam Ekonomi Pembangunan Indonesia 1966-1994*, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2003.
- Handono Adam Sukhajat, *Dinamika Bank Indonesia 1946-1968*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Ia Solihah, *Bank Indonesia*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 2000.
- Sumantoro, Martowijoyo, *Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkereditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Pedesaan*, Disertasi, Yogyakarta : UGM, 2002

Jurnal

- Anggito Abimanyu, Darmawan Budiarto, *Tantangan Deregulasi Instrumen Apa Lagi?*, dalam *Jurnal Prisma*, No.6, 1986 Tahun XV.